

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara, khususnya di bidang pembiayaan perekonomian. Berdasarkan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat yang kekurangan dana.

Melalui sebuah bank dapat dihimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan selanjutnya dari dana yang telah terhimpun tersebut, oleh bank disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor bisnis atau pihak lain yang membutuhkan. Semakin berkembang kehidupan masyarakat dan transaksi-transaksi perekonomian suatu negara, maka akan membutuhkan pula peningkatan peran sektor perbankan melalui pengembangan produk-produk jasanya.

Perusahaan perbankan yang ada di Indonesia meliputi Perusahaan perbankan di Indonesia meliputi Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSN Devisa), Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa (BUSN Non

Devisa), Bank Pembangunan Daerah, Bank Campuran dan Bank Asing. Dalam penelitian ini bank yang akan diteliti adalah Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah. Alasan pemilihan Bank Pemerintah dalam penelitian ini karena bank pemerintah merupakan bank yang sebagian besar dari seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dimana definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan alasan pemilihan Bank Pembangunan Daerah karena bank pembangunan daerah merupakan pemegang keuangan daerah, yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah, berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/penyimpanan kas daerah) selain menjalankan kegiatan bisnis perbankan.

Bank pemerintah di Indonesia berjumlah 4 bank sedangkan bank pembangunan daerah di Indonesia mencapai 26 bank dan telah memberikan kontribusi secara maksimal bagi perekonomian pemerintah dan daerah. Dengan adanya modal dari pihak ketiga yang ditempatkan pada bank pemerintah dan BPD menjadi beban sekaligus pendapatan. Menjadi beban karena bank diwajibkan membayar atas bunga yang ditempatkan dalam bentuk giro. Dana pihak ketiga

menjadi pendapatan bagi bank pemerintah dan BPD, apabila ditempatkan dalam bentuk antar bank aktiva maupun kredit kepada debitur. Jika selisih antara beban dan pendapatan yang dihasilkan lebih besar daripada penghasilan, maka keuntungan yang akan diperoleh, dan begitu sebaliknya.

Menurut Dendawijaya (2009) dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan mencapai 70%-80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya pendapatan dari bunga dan provisi kredit.

Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit.

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan

investasi, distribusi, dan konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai *Agent of Development* (Susilo, Triandaru, dan Santoso, 2006).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Goldsmith (1969), Mc Kinon dan Shaw (1973) menyatakan bahwa dana berlebih (*surplus fund*) yang disalurkan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (Pratama 2010).

Meskipun penyaluran kredit memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh perbankan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah periode 2008-2012 pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Gambaran LDR Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah
Periode 2008 – 2012 (Periode Desember)

Bank	Tahun	Rasio		
		DPK (Milyar Rp)	Kredit (Milyar Rp)	LDR (%)
Bank Pemerintah	2008	571,008	356,151	62,37
	2009	669,827	470,665	70,27
	2010	783,384	544,870	69,55
	2011	898,405	642,718	71,54
	2012	1,039,257	776,833	74,75
Bank Pembangunan Daerah	2008	134,287	71,881	53,53
	2009	143,262	96,385	67,28
	2010	152,251	120,754	79,31
	2011	183,624	143,707	78,26
	2012	235,265	175,702	74,68

Sumber: Data Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia www.bi.go.id)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa LDR Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah masih berkisar pada angka 62,37% - 79,31%. Data tersebut menunjukkan bahwa LDR Bank Pemerintah Bank Pembangunan Daerah masih berada dibawah harapan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada disekitar 85% - 110%.

LDR sendiri merupakan indikator dalam pengukuran fungsi intermediasi perbankan di Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana yang diterima yang meliputi giro, deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman.

Disesuaikan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan dana pihak ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antarbank).

Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin besar pula DPK yang dipergunakan untuk penyaluran kredit, yang berarti bank telah mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Disisi lain LDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penyaluran dana pihak ketiga (DPK) Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah ke sektor lain (di

luar kredit) pada tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 37,63% (100%-62,37%), 29,73%, 30,45%, 28,46%, dan 25,25%. Sedangkan DPK Bank Pembangunan Daerah ke sektor lain (di luar kredit) pada tahun 2008-2012 berturut - turut sebesar 46,47%, 32,72%, 20.69%, 21.74% dan 25.32%, yang antara lain disalurkan kedalam Antar Bank Aktiva, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyaluran DPK ke sektor lain (di luar kredit) masih cukup besar.

Menurut Dendawijaya (2009) Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dengan demikian jumlah penyaluran kredit memungkinkan adanya pengaruh terhadap DPK ataupun sebaliknya adanya pengaruh DPK terhadap jumlah penyaluran kredit.

Menurut Dendawijaya (2009) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat atau disebut dengan dana pihak ketiga (DPK), modal bank dalam memberikan kredit (rasio solvabilitas) yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), tingkat kolektibilitas kredit (kredit macet) yaitu *Non Performing Loan* (NPL), dan sisi profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA).

Dari sisi eksternal bank faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit antara lain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, penetapan tingkat suku bunga, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Menurut Sinungan (2000) kebijakan di

perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti : keadaan keuangan bank saat ini, pengalaman bank, dan keadaan perekonomian.

Kondisi Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Assets* (ROA) dan Kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah selama tahun penelitian dari tahun 2008-2012 dipaparkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Rata-rata DPK, CAR, NPL, ROA dan Kredit Bank Pemerintah dan Bank Pemerintahan Daerah Periode 2008 – 2012.

Bank	Tahun	Rasio				
		DPK (Milyar Rp)	CAR (%)	NPL (%)	ROA (%)	Kredit (Milyar Rp)
Bank Pemerintah	2008	571,008	17,85	6,50	2,76	356,151
	2009	669,827	14,31	3,74	2,72	470,665
	2010	783,384	13,81	3,46	2,71	544,870
	2011	898,405	15,36	2,80	3,08	642,718
	2012	1,039,257	15,04	2,55	3,60	776,833
Bank Pembangunan Daerah	2008	134,287	18,35	1,68	3,08	71,881
	2009	143,262	16,82	1,41	3,70	96,385
	2010	152,251	15,82	1,71	3,65	120,754
	2011	183,624	16,68	2,06	3,82	143,707
	2012	235,265	14,33	1,75	3,36	175,702

Sumber : Bank Indonesia (Statistik Perbankan Indonesia (data diolah))

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa jumlah penyaluran kredit dan DPK Bank Pemerintah selama tahun 2008-2012 mengalami peningkatan, CAR dan ROA mengalami fluktuatif, dan NPL mengalami penurunan. Sedangkan pada Bank Pembangunan Daerah selama tahun 2008-2012 kredit dan DPK mengalami peningkatan sedangkan CAR, NPL, dan ROA menunjukkan hasil yang fluktuatif.

DPK pada Bank Pemerintah Bank dan Pembangunan Daerah tahun 2008-2012 mengalami kenaikan, sama halnya dengan kredit yang disalurkan dari tahun 2008-2012 juga mengalami kenaikan. Sesuai dengan teorinya dimana jika DPK

mengalami peningkatan maka jumlah penyaluran kredit juga akan meningkat atau sebaliknya. DPK adalah rasio *solvabilitas*, jika rasio ini meningkat maka tingkat penyaluran kredit perbankan meningkat.

CAR pada Bank Pemerintah tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebesar 3,54% tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 114,514. Sedangkan CAR pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2008-2009 juga turun sebesar 1,53% akan tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 96,313. Hal ini bertentangan dengan teori dimana jika CAR mengalami peningkatan maka jumlah penyaluran kredit juga akan meningkat atau sebaliknya. CAR adalah rasio kecukupan modal (*solvabilitas*), jika rasio ini meningkat maka tingkat penyaluran kredit perbankan meningkat.

NPL adalah salah satu fungsi dari bank untuk menyalurkan dana pihak ketiga kedalam bentuk kredit. NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menjaga resiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Rasio NPL pada Bank Pemerintah tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebesar 2,76% tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 114,514. Sedangkan NPL Bank Pembangunan Daerah tahun 2011-2012 juga mengalami penurunan sebesar 0.27% akan tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 96,313. Hal ini bertentangan dengan teori dimana jika NPL mengalami peningkatan maka jumlah penyaluran kredit juga akan meningkat atau sebaliknya.

ROA pada Bank Pemerintah tahun 2008-2009 mengalami penurunan sebesar 0,04% tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 114,514. Sedangkan ROA pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2009-2010 turun sebesar

0,05% akan tetapi kredit justru mengalami kenaikan sebesar 24,369. Hal ini bertentangan dengan teori dimana jika ROA mengalami peningkatan maka jumlah penyaluran kredit juga akan meningkat atau sebaliknya. ROA adalah rasio Profitabilitas, jika rasio ini meningkat maka tingkat penyaluran kredit perbankan meningkat.

Melalui penelitiannya Maharani (2011) menemukan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan, NPL berpengaruh negative dan signifikan terhadap kredit perbankan. Sedangkan menurut Triasdini (2008), CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Menurut Soedarto (2004), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan, *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan. Menurut Fransisca (2009) DPK dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit perbankan, NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kredit perbankan.

Berdasarkan pada fenomena gap dan keragaman argumentasi (*research gap*) hasil penelitian yang ada mengenai pengaruh faktor-faktor internal yang mempengaruhi kredit perbankan, dan dengan adanya peningkatan dan penurunan tiap-tiap komponen diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Return On Assets* (ROA) selama tahun 2008-2012 memiliki perbedaan terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) maka penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

Penyaluran Kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
2. Apakah pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap penyaluran kredit lebih signifikan terhadap Bank Pemerintah daripada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
2. Perbandingan pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap penyaluran kredit yang lebih signifikan antara Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi mengenai analisis kesehatan bank, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam mengambil kebijakan perbankan, khususnya dalam hal penyaluran kredit kepada masyarakat.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit kepada masyarakat, atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan.